

PENGARUH PENERAPAN DIMENSI VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

¹Felmi D. Lantowa, ²Fariani Machmud

¹Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

²Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo
Provinsi Gorontalo 9600, Indonesia

Email : Felmi.lantowa@umgo.ac.id

Abstract

Felmi D. Lanowa 2018. “The effect of applying Value for Money toward public accountability at Department of Public Health Bone Bolango, Gorontalo”. Study Program of Accountancy. Department of Accountancy, Faculty of Economy and Business. Gorontalo State University. Supervisor: Sahmin Noholo, SE, MM., Co-Supervisor: La Ode Rasuli, S.Pd, SE, MSA

The objectives of this study are to test and know the effect of applying Value for Money (economical, efficiency, effectiveness) toward public accountability at Department of Public Health Bone Bolango, Gorontalo. The study was held at Department of Public Health Bone Bolango, Gorontalo. The sample of the study is the employee that consists of 32 respondents by using random sampling method. The data was analyzed by using regression analysis.

The result of this study shows that 1) the applying of Value for Money at Department of Public Health Bone Bolango, Gorontalo was in a good condition or categorized in medium. 2) Public accountability at Department of Public Health Bone Bolango, Gorontalo was in a good condition or categorized in medium 3) the applying Value for Money which consists of economical, efficiency, effectiveness was effect positively and significantly toward public accountability. Economical and efficiency variable was effect positively toward public accountability. Moreover, effectiveness was effect positively toward public accountability but not too significant. 4) Determination analysis result shows dependent variable (public accountability) can be explained by independent variable (value for money).

Keywords: Effectiveness, Organization, Management, Library Area

Abstrak

Felmi D. Lantowa. 2018. Pengaruh Penerapan Dimensi *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Bapak Sahmin Noholo, SE, MM dan Pembimbing II Bapak La Ode Rasuli, S.Pd, SE, MSA

Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan dimensi *value for money* (ekonomis, efisiensi, efektivitas) terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Adapun yang terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan metode pengambilan sampel acak sederhana sebanyak 32 pegawai/responden. Analisis data penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kondisi penerapan dimensi *value for money* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang. 2) Kondisi akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang. 3) Pengaruh penerapan dimensi *value for money* yang terdiri dari dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik secara keseluruhan, tapi secara masing-masing dari tiga dimensi *value for money* yang diamati hanya variabel ekonomis dan variabel efisiensi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan variabel efektivitas walaupun mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik namun pengaruhnya tidak signifikan. 4) Hasil analisis determinasi menunjukkan variabel dependen (akuntabilitas publik) mampu dijelaskan oleh variabel independen (*value for money*).

Kata Kunci: Efektivitas, Pengorganisasian, Pengelolaan, Perpustakaan Daerah

PENDAHULUAN

Secara kelembagaan, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dan sektor swasta adalah fokus utama aktivitas organisasi, dimana sektor swasta berorientasi pada maksimalisasi laba sedangkan sektor publik berorientasi pada pemberian layanan optimal bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan layanan optimal kepada masyarakat pemerintah daerah dituntut lebih responsif dan cepat tanggap guna menciptakan *good governance*,

(Mardiasmo, 2005: 16).

Good governance menurut United Nation Development Program (UNDP) adalah cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan aspek ekonomis dan proses pembuatan keputusan yang berimplikasi pada masalah pemerataan yang efektif, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup yang efisiensi dan aspek administratif yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *good governance* organisasi dituntut untuk menerapkan dimensi

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Penerapan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi sektor publik sering disebut dengan istilah *value for money*, (Mardiasmo, 2005: 16).

Penerapan *value for money* yang menekankan pada dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengembangan sumber daya publik saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah pada khususnya belum mampu menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang dimiliki untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih terdapat fenomena negatif dalam rangka penerapan dimensi *value for money* sektor publik untuk proses terwujudnya akuntabilitas kepada masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama tahun berjalan, yang dituangkan dalam perbandingan hasil realisasi pencapaian indikator kinerja dari target yang telah ditentukan selama tahun berjalan. Lebih lanjut Renyowijoyo (2008: 22), menjelaskan bahwa bukti dari rendahnya

penerapan dimensi *value for money* untuk meningkatkan akuntabilitas publik dapat dilihat dari tidak tercapainya capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja berdasarkan bobot persentase sasaran/target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi sektor publik selama tahun berjalan (capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja lebih rendah dari capaian bobot persentase sasaran/target indikator kinerja).

Oleh karena itu, berdasarkan tabel 1 capaian bobot persentase realisasi indikator kinerja dan capaian bobot persentase sasaran/target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya menerapkan *value for money* yang memiliki dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan publik. Lebih lanjut, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan penilaian negatif masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dimana masyarakat menganggap Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango merupakan instansi sektor publik yang tidak efisien, adanya pemborosan dan tidak ekonomis, serta tidak efektif dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dipercayakan publik. Oleh karena itu,

berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas maka berbagai penelitian mengenai penerapan dimensi *value for money* telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerapan dimensi *value for money* untuk terwujudnya proses akuntabilitas publik.

Penelitian tersebut diantaranya penelitian Suwardi (2010), yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan *value for money* terhadap peningkatan akuntabilitas publik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung. Hasil penelitian Suwardi (2010), menyatakan bahwa *value for money* merupakan perluasan dari kepatuhan dalam hal tujuan dan prosedur pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan akuntabilitas publik pemerintah perlu menerapkan analisis *value for money* yang memiliki tiga dimensi utama yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E).

Penelitian terdahulu mengenai “Pengaruh Penerapan Dimensi *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango”.

Ditulis oleh Fariyani Machmud,

1. Adapun yang membedakan dengan artikel yang ditulis ini ialah Bagaimana kondisi penerapan dimensi *value for*

money pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango?

2. Bagaimana kondisi akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan dimensi *value for money* terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango?

Tujuan penulisan artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis kondisi penerapan dimensi *value for money* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
2. Menguji dan menganalisis kondisi akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan dimensi *value for money* terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
4. Menguji dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan dimensi *value for money* terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. Azwar (2000: 13), menyatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian dengan mengambil sampel dari satu

populasi dan data yang pokok serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan *value for money* yang meliputi dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang dapat mempengaruhi akuntabilitas publik pada salah satu organisasi sektor publik yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan di Gorontalo, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Proses penelitian yang dilakukan peneliti adalah \pm 6 bulan, mulai dari Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kesehatan Bone Bolango.

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan survey. Menurut Sugiyono (2011: 9), deskriptif analitis adalah metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap kondisi obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Indikator Penelitian

Sugiyono (2011: 5), menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*construct*)

atau sifat yang akan dipelajari. Lebih lanjut Sugiyono menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different values*). Oleh karena itu, variabel merupakan suatu yang bervariasi. Variabel adalah suatu kualitas (*qualities*) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2011: 61). Adapun kriteria dalam pemilihan populasi adalah sebagai berikut:

1. Merupakan staf/pegawai bagian keuangan yang bertanggung jawab langsung atas penerapan *value for money* dalam pengelolaan sumber daya keuangan.
2. Staf/pegawai selain bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk menerapkan *value for money* dalam pengelolaan sumber daya dan program yang dipercayakan publik.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 66 pegawai/responden yang terdiri dari seluruh pegawai yang terkait langsung dan seluruh pegawai yang

bertanggung jawab dengan penerapan *value for money* dalam menggunakan dan mengelola sumber daya publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 120), teknik *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Oleh karena pertimbangan di atas, maka yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 32 pegawai/responden dari jumlah seluruh populasi sebanyak 66 pegawai/responden. Adapun rincian sampel dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5: Sampel Penelitian

No	Sub Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	1
2	Kelompok Jabatan Fungsional	2
2	Sekretaris	1
3	Bagian Umum dan Kepegawaian	3
4	Bagian Keuangan dan Aset	7
5	Bagian Pembinaan dan Pel. Kesehatan	4
6	Bagian P2M-PL	4
7	Bagian KESGA	4
8	Bagian Perencanaan Surveilance dan SIK	4
9	UPTD	2
	TOTAL	32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, 2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango yang merupakan salah satu organisasi sektor publik di Gorontalo yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2003, maka dibentuklah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bone Bolango tahun 2004 adalah 7 buah yang terdiri atas tiga Puskesmas DPT dan empat Puskesmas TTP dan tersebar di empat kecamatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2004 sebanyak dua buah yaitu 1 buah Rumah Sakit Kusta Toto dan 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato. Sampai dengan bulan Desember tahun 2004 jumlah Pustu/Polindes yang mengalami kerusakan baik rusak berat maupun ringan sebanyak 33 buah atau sebesar 84,62 %, sedangkan puskesmas keliling darat roda empat sebanyak tujuh buah, dimana hanya dua buah diantaranya dalam keadaan baik dua buah rusak ringan dan tiga buah rusak berat. Jumlah rumah dinas dokter di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 20 buah. Jumlah sepeda motor seluruhnya 16 buah. Penambahan beberapa fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat menambah mutu dan jangkauan pelayanan meningkat.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi dan staf/pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (*kuesioner*) yang telah disebarluaskan langsung oleh peneliti kepada responden. Data demografi responden dalam tabel 6 di bawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Tabel 6 data demografi responden di bawah ini berisi informasi yang disajikan, antara lain jenis

kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja.

Tabel 6: Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	11	34,38 %
2. Perempuan	21	65,62 %
Usia		
1. < 30 tahun	11	34,37 %
2. 30 – 40 tahun	11	34,37 %
3. 40 – 50 tahun	8	25,00 %
4. > 50 tahun	2	6,25 %
Tingkat Pendidikan		
1. S2	2	6,25 %
2. S1	17	53,13 %
3. D3	11	34,37 %
4. D1	-	-
5. SMA	2	6,25 %
Masa Kerja		
1. 1-2 tahun	2	6,25 %
2. 2-4 tahun	10	31,25 %
3. 4-6 tahun	8	25,00 %
4. 6-10 tahun	5	15,62 %
5. > 10 tahun	7	21,87 %

Sumber: Data Olahan, 2012

Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri 34,38 % laki-laki dan 65,62 % perempuan, dilihat berdasarkan usia responden dapat diketahui bahwa yang berusia kurang dari 30 tahun adalah 34,37 %, usia 30 sampai 40 tahun 34,37 %, usia 40 sampai 50 tahun 25 % dan yang berusia di atas 50 tahun 6,25 %. Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 53,13 %, S2 sebesar 6,25 %, kemudian mereka yang berpendidikan D3 sebanyak 34,37 %, dan SMA sebanyak 6,25 %. Selanjutnya

responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja lebih dari 10 tahun adalah sebanyak 21,87 %, yang memiliki masa kerja 6-10 tahun sebanyak 15,62 %, yang memiliki masa kerja 4-6 tahun sebanyak 25%, yang memiliki masa kerja 2-4 tahun 31,25 % dan yang memiliki masa kerja 1-2 tahun sebesar 6,25 %.

1.1.1. Deskripsi Hasil Pembagian Kuisisioner Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai instrumen pengumpulan data, sehingga instrumen ini harus di uji validitas (keabsahan) dan realibilitas (kehandalan). Oleh karena itu untuk meyakinkan akan kualitas data yang akan diolah, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya

1. Pendekatan Sumber,

Berdasarkan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas yang telah dilakukan ternyata pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian. Para responden penelitian bukan merupakan responden yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Masing-masing indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif mengenai kriteria jawaban responden. Langkah awal

untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pernyataan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Riduwan (2008: 15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 32 = 32$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 32 = 160$$

$$160 - 32 \text{ Rentang skalanya yaitu: } 25,6 = 26 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 11 berikut:

Tabel 11: Skala penilaian jawaban

Responden

Variabel X Terhadap Variabel Y

Range	Kategori
> 160	Sangat tinggi
133 - 159	Tinggi
106 - 132	Sedang
79 - 105	Rendah
52 - 78	Sangat rendah

Sumber: Data Olahan, 2012

1.2. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Dimensi *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan dimensi *value for money* terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni “penerapan dimensi *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik” adalah terbukti dan dapat diterima atau H_0 ditolak. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil perhitungan berdasarkan uji Anova (*Analisis of variance*) atau uji F, didapat nilai f_{hitung} sebesar 6.071, sedangkan nilai f_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas (3 ; 28) sebesar 2.960. Oleh karena nilai f_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai f_{tabel} maka H_0 ditolak. Artinya secara keseluruhan model telah signifikan. Hal ini berarti penerapan dimensi *value for money*, yang terdiri berdasarkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suwardi (2010), yang menjelaskan bahwa *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung. Semakin diterapkan dan ditingkatkan *value for money* yang memiliki dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, akan semakin meningkatkan akuntabilitas publik.

2. Pengaruh Dimensi Ekonomis terhadap Akuntabilitas Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan dimensi ekonomis terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

1.2.1 Pendekatan Proses

Pendekatan proses, pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan semua kegiatan proses internal atau mekanisme kerja organisasi yang meliputi unsur-unsur kerjasama, loyalitas kerja dan perhatian atasan terhadap karyawan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kondisi penerapan dimensi *value for money* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang.

2. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kondisi akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa walaupun secara bersama-sama pengaruh penerapan dimensi *value for money* yang terdiri dari dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, tapi berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara masing-masing disimpulkan bahwa dari tiga dimensi *value for money* yang diamati hanya variabel ekonomis dan variabel efisiensi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan variabel dimensi efektivitas walaupun mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik namun pengaruhnya tidak signifikan.
4. Hasil analisis determinasi menunjukkan r^2 sebesar 0,394 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas publik) mampu dijelaskan oleh variabel independen, yaitu variabel ekonomis (X_1), efisiensi (X_2), dan efektivitas (X_3) sebesar 39,4%, sebaliknya sebesar 60,6% (100%-39,4%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak

diikutsertakan dalam penelitian ini seperti keadilan dan pemerataan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, diharapkan lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat dalam menggunakan sumber daya publik yang dipercayakan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan aktivitas finansial pemerintahan melalui konsep *value for money*. Oleh karena itu melalui konsep *value for money* dalam transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban aktivitas finansial pemerintahan, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango lebih mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi dengan dinas pemerintah pusat serta antara dinas pemerintah daerah lainnya dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, diharapkan lebih meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik melalui perbaikan kinerja

pemerintah. Oleh karena itu, sangat diperlukan *value for money* yang meliputi dimensi ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta dimensi lainnya seperti keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*), yang merupakan perluasan dari kepatuhan tujuan dan prosedur penyelenggaraan akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

3. Baik untuk seluruh pegawai dan terutama pegawai bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dipercayakan publik diharapkan dapat menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam konsep *value for money*. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan akuntabilitas publik baik akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas publik, dimana berdasarkan fenomena yang ada saat ini masyarakat tidak percaya pada kinerja entitas pemerintah.
4. Bagi penelitian selanjutnya, kiranya dapat lebih memperdalam analisis pengaruh penerapan *value for money* yang memiliki dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban aktivitas finansial di bidang pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat lebih mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas publik selain dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, diantaranya adalah keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomis. Kesetaraan artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Pengantar Akuntansi Sektor Publik dan Auditing*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Sarifuddin. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revisond. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Deis dan Giroux. 2010. Efektivitas Akuntabilitas Publik dan *Value for Money* (http://en.wikipedia.org/wiki/Value_for_money-

- audit%28economics%29, diakses 5 Desember 2011).
- Djueni, Achmad. 2010. Pengertian *Value for Money* dan Akuntabilitas Publik (<http://repository.value-for-money.usu.ac.id/bitstream/123456789/22593/1/Appendix.pdf>, diakses 21 Februari 2011).
- Effendy. 2009. Konsepsi Ekonomis *Value for Money* (<http://www.businessdictionary.com/definition/value-for-money-VFM.html>, diakses 5 Desember 2011).
- Hasan. 2008. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik (<http://wordpress.com/2008/01/12/pengujian-hipotesis-penelitian-uji-simultan-uji-parsial-dengan-teknik-penelitian-deskriptif-disk225/>, diakses 13 Februari 2011).
- Ihyaul. 2010. Transparansi dan Akuntabilitas Publik (<http://ihyaul.staff.umm.ac.id/files/2010/02/Akuntabilitas-Publik-Citra.pdf>, diakses 5 Desember 2011).
- Kadmasasmita, Achmad. 2006. Analisis *Value for Money* untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (http://www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&site=&source=hp&q=hubungan+value+for+money+dan+akuntabilitas+publik&pbx=1&oq=hubungan+value+for+money+dan+akuntabilitas+publik&aq=f&aqi=&aql&bav=on.2.or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b921007e47919c0e&biw=1024&bih=580, diakses Februari 2011).
- Kurniawan. 2010. Otonomi Daerah dan Efisiensi *Value for Money* (<http://www3.imperial.ac.uk/secretariat/policiesandpublications/value-for-money>, diakses 5 Desember 2011).
- Mahmud, Abbas. 2010. Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Analisis *Value for Money* pada Pemerintah Kota Blitar (<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-akuntansi-pemerintah/pewujudan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik-melalui-akuntansi-sektor-publik/akuntabilitas-publik-transparansi.html>, diakses 5 Desember 2011).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Riduwan. 2008. *Metode Dan Tehnik Menyusun Tesis, cetakan keenam*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke-18*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke-19*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan ke-19*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Harry. 2005. *Compliance Audit Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulastri. 2009. Analisis *Value for Money* untuk Peningkatan Akuntabilitas Publik (<http://value-for-money-audit%26hl%3Did%26client%3Dfi>

refox_a%26rls%3Dorg.mozilla:en,
diakses 13 Februari 2011).

Suwardi, Wardhi. 2010. Pengaruh Penerapan *Value for Money* terhadap Peningkatan Akuntabilitas Publik (<http://elib.unikom.ac.id/hubungan-value-for-moneyfiles/disk1/127/jbptunikomp-p-gdl-s1-2007-gianikutam-6344-daftar-i-i.pdf>, diakses 5 Desember 2011).

Tanjung, Hafiz. 2006. *Menuju Pemerintahan Good Governance*. Bandung: Alfabeta.

Tjiptono, Eko. 2010. Jurnal Ekonomi Akuntansi. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm, diakses, 13 Februari 2011).

Wijaya, Toni. 2011. *Cepat Menguasai SPSS 19 (Untuk Olah & Interpretasi Data Penelitian, Skripsi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma.